

LEGAL CHALLENGES OF AI-INDUCED COPYRIGHT INFRINGEMENT: EVALUATING LIABILITY AND DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS IN DIGITAL ERA



NANDA YUNIZA EVIANI

NIM. B011211236



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

TUGAS AKHIR

TANTANGAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA AKIBAT AI: EVALUASI TANGGUNG JAWAB DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI ERA DIGITAL

LEGAL CHALLENGES OF AI-INDUCED COPYRIGHT INFRINGEMENT: EVALUATING LIABILITY AND DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS IN DIGITAL ERA



Oleh:

NANDA YUNIZA EVIANI

B011211236

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

TUGAS AKHIR

TANTANGAN HUKUM PELANGGARAN HAK CIPTA AKIBAT AI: EVALUASI TANGGUNG JAWAB DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI ERA DIGITAL

LEGAL CHALLENGES OF AI-INDUCED COPYRIGHT INFRINGEMENT: EVALUATING LIABILITY AND DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS IN DIGITAL ERA



Oleh:

NANDA YUNIZA EVIANI
B011211236

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

LEGAL CHALLENGES OF AI-INDUCED COPYRIGHT INFRINGEMENT: EVALUATING LIABILITY AND DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS IN DIGITAL ERA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada Program
Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :

NANDA YUNIZA EVIANI
B011211236

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

LEGAL CHALLENGES OF AI-INDUCED COPYRIGHT
INFRINGEMENT: EVALUATING LIABILITY AND DISPUTE
RESOLUTION MECHANISMS IN DIGITAL ERA

Disusun dan diajukan oleh

NANDA YUNIZA EVIANI
B011211236

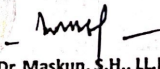
Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang 8 Indikator Kinerja
Utama untuk dapat dikonversi sebagai tugas akhir/Skripsi, sehingga dinyatakan telah
memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui :

Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum

Dosen Pembimbing


Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 19840818 201012 1 005


Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005


Dekan Fakultas Hukum,
Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200, (6 Saluran), 584200, FAX (0411) 585188
Laman www.unhas.ac.id

BERITA ACARA
KONVERSI MATA KULIAH SKRIPSI
PROGRAM PUBLIKASI ARTIKEL JURNAL
Nomor 00310/UN4.5/PK.03.06/2025

Judul : Legal Challenges of AI-Induced Copyright Infringement: Evaluating Liability and Dispute Resolution Mechanisms in Digital Era
N a m a : Nanda Yuniza Eviani
Nomor Pokok : B011211236
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Kode	Capaian Pembelajaran	Nilai Angka	Kode	Konversi Mata Kuliah	SKS	Nilai Huruf
S1	Sikap	88	18B011413204	Skripsi	4	A
P3	Pengetahuan					
KU1	Keterampilan Umum 1					
KU2	Keterampilan Umum 2					
KU3	Keterampilan Umum 3					
KK1	Keterampilan Khusus 1					

Menyetujui,
Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, SH.,M.Kn.
NIP. 198408182010121005

Makassar, 13 Januari 2025
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan



Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 197611291999031005



**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi/tugas akhir berjudul "Legal Challenges of AI-Induced Copyright Infringement: Evaluating Liability and Dispute Resolution Mechanisms in Digital Era" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi/tugas akhir ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi/tugas akhir ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 7 Agustus 2024



Nanda Yuniza Evlani
NIM. B011211236

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur tak henti-hentinya Penulis panjatkan kepada Allah *subhanahu wata'ala.* atas rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “**Legal Challenges of Ai-Induced Copyright Infringement: Evaluating Liability and Dispute Resolution Mechanisms in Digital Era**”, yang merupakan hasil tulisan Penulis yang berhasil di publikasi pada *Jambura Law Review*, salah satu jurnal ilmiah bereputasi Internasional. Adapun tugas akhir ini sebagai syarat menyelesaikan perkuliahan jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulisan Tugas Akhir ini tak akan dapat bisa Penulis selesaikan tanpa adanya dukungan dan doa dari orang-orang sekitar Penulis. Untuk yang pertama dan utama, terima kasih Penulis ucapkan kepada orang tua Penulis, Papa dan Mama, yang telah mempercayai dan memberikan dukungan yang masif kepada Penulis untuk dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Kepada kakak-kakak Penulis, Kakak Riri, Kakak Botha, dan Kakak Rio, Penulis sadar bahwa dukungan dari kakak-kakak Penulis turut andil dalam kepenulisan Tugas Akhir ini. *Last but not least*, kepada Adik-Adik Penulis, Aviv dan Evin, yang juga menjadi semangat Penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan Tugas Akhir Penulis, terima kasih banyak, *dik.* Tugas Akhir ini Penulis persembahkan kepada keluarga Penulis tercinta.

Pada kesempatan ini juga Penulis turut memberikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan Tugas Akhir ini, yaitu kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. dan Bapak Ahmad Fachri Faqi, S.H., LL.M. yang keduanya merupakan Pembimbing Penulis yang juga telah bersedia menjadi penulis dalam Tugas Akhir Penulis dan senantiasa sabar dan memberikan arahan serta motivasi kepada Penulis selama penyusunan Tugas Akhir ini;
4. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Satgas PPKS Unhas beserta seluruh jajaran Tim Satgas PPKS Unhas dan Sekretariat yang telah memberikan Penulis ilmu dan pengalaman yang sangat berharga dan berarti di masa perkuliahan Penulis;
5. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu Penulis selama penulisan Tugas Akhir Penulis;
6. Bapak Ahsan Yunus, S.H., M.H. yang telah membantu dan memudahhi Penulis dalam melatih *skill* kepenulisan Penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum;

7. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selama ini telah menyalurkan ilmu yang begitu banyak dan bermanfaat kepada Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
8. Muhammad Rafli Nur Rahman, yang tak henti-hentinya memberikan dukungan moral dan terus setia menemani Penulis, utamanya saat penulisan Tugas Akhir Penulis;
9. *Geng baik*, yakni Ais, Naya, Amel, dan Sisy yang telah menemani Penulis dan memberikan semangat serta dukungan yang tiada henti, utamanya selama masa penulisan Tugas Akhir ini;
10. Teman-teman Penulis, Amel Yudiarta, Aika Djuanna, dan Andien Julian yang selalu setia menemani, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan saran kepada Penulis;
11. Teman kelas Penulis, Keluarga Rumahorbo, yang telah kebersamai Penulis dari masih berstatus mahasiswa baru hingga kini Penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir, *what a wonderful journey I've been thru with you all*;
12. Teman-teman seperjuangan Penulis, yakni Widad, Pia, Dyar, Dindanaf, dan Rara yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan moral kepada Penulis hingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir Penulis;
13. Teman-teman Penulis, yakni Wanda, Aura, Dinda, Ghaitza, Virgin, dan Adinda yang telah menjadi *support system* bagi Penulis hingga dapat menyelesaikan studi Penulis di Fakultas Hukum;

14. Keluarga besar Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) yang telah mewadahi Penulis dengan banyaknya pengalaman baru yang Penulis yakini akan menjadi batu loncatan Penulis dalam mengejar karir kedepannya;
15. Keluarga besar Asian Law Students' Association (ALSA) yang telah memfasilitasi Penulis dengan program-program yang menunjang keterampilan Penulis;
16. Peliharaan Penulis, yakni Simba, Goku, Kai, dan kucing-kucing Penulis yang turut memberikan semangat selama masa perkuliahan Penulis;
17. Serta ucapan terima kasih kepada pihak-pihak lainnya yang tidak sempat Penulis sebutkan satu per satu yang juga telah berpartisipasi serta memberikan dukungan dalam penyusunan tugas akhir ini.

Penulis berharap semoga atas segala bantuan serta kebaikan yang telah Penulis terima akan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis juga mengucapkan mohon maaf jika tugas akhir Penulis masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Terakhir, Penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan kebermanfaatan kepada tiap-tiap yang membacanya dan berpartisipasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Alhamdulillah Robbil A'lamin Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 07 Agustus 2024

Nanda Yuniza Eviani

ABSTRAK

NANDA YUNIZA EVIANI (B011211236). “Tantangan Hukum Pelanggaran Hak Cipta yang Disebabkan oleh AI: Mengevaluasi Tanggung Jawab dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Era Digital”. Dibimbing oleh **Maskun** sebagai pembimbing.

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah menghadirkan kemajuan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekaligus menimbulkan tantangan hukum yang kompleks, terutama dalam kasus pelanggaran hak cipta. Kemampuan AI untuk mereplikasi dan menyebarkan konten berhak cipta tanpa izin memunculkan pertanyaan mengenai kecukupan kerangka hukum yang ada.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pertanyaan kritis terkait tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang melibatkan AI, dengan meneliti peran dan tanggung jawab pengembang, pengguna, serta sistem AI itu sendiri. Kajian komprehensif terhadap undang-undang dan peraturan yang relevan dilakukan menggunakan metodologi kualitatif normatif, didukung oleh analisis kasus serta perkembangan hukum terkini, disertai perbandingan menyeluruh dari terminologi yang terkait. Faktor hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang berlaku dalam pelanggaran hak cipta berbasis AI juga dipertimbangkan. Mengingat otonomi AI, kerangka tanggung jawab konvensional seperti *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) dianggap kurang memadai dalam menangani pelanggaran yang disebabkan oleh AI. Sebagai alternatif, strategi tanggung jawab berbasis kesalahan, yang mensyaratkan adanya bukti niat atau kelalaian, diusulkan untuk meningkatkan akuntabilitas.

Penelitian ini juga menganalisis kekuatan dan kelemahan mekanisme penyelesaian sengketa dalam menangani pelanggaran hak cipta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa yang dikelola oleh Organisasi Hak Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) menawarkan kerangka kerja yang solid dalam menyelesaikan sengketa, setelah dilakukan perbandingan antara peraturan dan mekanisme yang ada.

Kata Kunci: Kecerdasan Buatan; Pelanggaran Hak Cipta; Resolusi; WIPO; Tanggung Jawab

ABSTRACT

NANDA YUNIZA EVIANI (B011211236). “Legal Challenges of AI-Induced Copyright Infringement: Evaluating Liability and Dispute Resolution Mechanisms in Digital Era”. Supervised by **Maskun** as supervisor.

The development of artificial intelligence (AI) has introduced unprecedented technological advancements and complex legal challenges, particularly in copyright infringement. The capability of the systems to replicate and disseminate copyrighted content without authorization raises questions about the adequacy of existing legal frameworks.

Therefore, this research aims to explore the critical question of liability for AI-related copyright infringement, examining the responsibilities of developers, users, and systems. A comprehensive examination of relevant laws and regulations is carried out using a normative qualitative methodology. This is supported by case research and recent legal advancements, with a comprehensive comparison of relevant terms. Legal factors and dispute resolution methods applicable to AI-related copyright infringement are also considered. Due to the systems' autonomy, standard liability frameworks such as Digital Millennium Copyright Act (DMCA) cannot address AI-induced infringement. Meanwhile, a fault-based liability strategy that requires proof of purpose or negligence is suggested to improve accountability.

This research reports the strengths and weaknesses of using dispute resolution mechanisms to solve copyright infringement. The results show that World Intellectual Property Organization (WIPO) dispute resolution provides a robust framework for resolving disputes after comparing regulations and mechanism

Keywords: Artificial Intelligence; Copyright Infringement; Resolution; WIPO; Liability

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
BERITA ACARA KONVERSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
KARYA ILMIAH.....	1

LAMPIRAN

Lampiran 1. Laman website Jurnal Jambura Law Review

Lampiran 2. Laman website Scopus

Lampiran 3. Laman website SINTA

Legal Challenges of AI-Induced Copyright Infringement: Evaluating Liability and Dispute Resolution Mechanisms in Digital Era

Nanda Yuniza Eviani¹✉
Maskun²
Ahmad Fachri Faqi³

^{1,2,3}Faculty of Law, Universitas Hasanuddin, Indonesia.

✉nandayuniza0202@gmail.com

Article Info

Submitted: Feb 12, 2024
Revised: June 12, 2024
Accepted: June 30, 2024

Keywords:

Artificial Intelligence;
Copyright Infringement;
Resolution; WIPO;
Liability

How to cite [Chicago Manual of Style 17th edition (full note)]:

Nanda Yuniza Eviani, Maskun, and Ahmad Fachri Faqi, "Legal Challenges of AI-Induced Copyright Infringement: Evaluating Liability and Dispute Resolution Mechanisms in Digital Era," *Jambura Law Review* 6, no. 2 (2024): 403-428.

©2024 - Nanda Yuniza Eviani, Maskun and Ahmad Fachri Faqi
Under the license CC BY-SA 4.0

Abstract

The development of artificial intelligence (AI) has introduced unprecedented technological advancements and complex legal challenges, particularly in copyright infringement. The capability of the systems to replicate and disseminate copyrighted content without authorization raises questions about the adequacy of existing legal frameworks. Therefore, this research aims to explore the critical question of liability for AI-related copyright infringement, examining the responsibilities of developers, users, and systems. A comprehensive examination of relevant laws and regulations is carried out using a normative qualitative methodology. This is supported by case research and recent legal advancements, with a comprehensive comparison of relevant terms. Legal factors and dispute resolution methods applicable to AI-related copyright infringement are also considered. Due to the systems' autonomy, standard liability frameworks such as Digital Millennium Copyright Act (DMCA) cannot address AI-induced infringement. Meanwhile, a fault-based liability strategy that requires proof of purpose or negligence is suggested to improve accountability. This research reports the strengths and weaknesses of using dispute resolution mechanisms to solve copyright infringement. The results show that World Intellectual Property Organization (WIPO) dispute resolution provides a robust framework for resolving disputes after comparing regulations and mechanism

1. Introduction

Artificial intelligence (AI) is the beginning of a new period of technical progress, with unparalleled prospects in several industries. The development has also introduced complex legal dilemmas, particularly in the area of copyright infringement.¹ In this context, copyright infringement refers to the unauthorized use of material that violates the exclusive rights of copyright owner.² The issue has become more widespread due to the increasing prevalence of technology. AI systems engaged in content development and data analysis frequently make use of extensive material, which gives rise to major concerns over potential infringement of copyright law.³ The concerns are intensified by the magnitude of distributing copyrighted creations, without appropriate acknowledgement or authorization from the original creators. An exemplary instance is legal action against OpenAI, an AI corporation, where the language model, GPT-3, produced content violating pre-existing copyright. Similarly, Google's DeepMind has been under scrutiny for using copyrighted information in the training of the AI systems without acquiring appropriate permits.⁴

A survey disclosed that most of the AI companies used intellectual materials without explicit agreement, showing the pervasive nature of the problem.⁵ The examples show the urgent requirement for a strong legal structure in dealing with the intricacies of copyright violation. Legal consequences of the instances have led to extensive discussion over the sufficiency of existing copyright rules in governing AI technology. In addition, these instances act as crucial experimental grounds for the judiciary's capacity to adjust to the distinct issues presented by copyright infringement.⁶

¹ Muhammad Hamza Zakir et al., "Navigating the Legal Labyrinth: Establishing Copyright Frameworks for AI-Generated Content," *Remittances Review* 9, no. 1 (March 22, 2024): 2515–32.

² Irina Atanasova, "Copyright Infringement in Digital Environment," *Economics & Law* 1, no. 1 (2019): 13–22.

³ Mark Fenwick and Paulius Jurcys, "Originality and the Future of Copyright in an Age of Generative AI," *Computer Law & Security Review* 51 (November 1, 2023): 105892, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105892>.

⁴ Deven R. Desai and Mark Riedl, "Between Copyright and Computer Science: The Law and Ethics of Generative AI" (arXiv, 2024), <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2403.14653>.

⁵ Etinosa Igbinenikaro and Adefolake Olachi Adewusi, "Navigating the Legal Complexities of Artificial Intelligence in Global Trade Agreements," *International Journal of Applied Research in Social Sciences* 6, no. 4 (April 7, 2024): 488–505, <https://doi.org/10.51594/ijarss.v6i4.987>.

⁶ Yadong Cui, *Artificial Intelligence and Judicial Modernization* (Singapore: Springer, 2020), <https://doi.org/10.1007/978-981-32-9880-4>.

The focal point of legal dispute revolves around the issue of liability to determine the bearer of responsibility when an AI system violates copyright. Responsibility could be attributed to the engineers, users, or AI as an autonomous entity. Therefore, this research aims to investigate the inquiries within civil law, with a specific emphasis on reparation and the process of arbitration. The International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) has documented more than 150 instances of copyright issues relating to AI in the last five years.⁷ The main purpose is to clarify the civil remedies used to address copyright infringement and determine the appropriate legal venues for resolving disputes. This research reports the duties and possible legal obligations of various players engaged in the creation and implementation of AI technology.

Current legal frameworks and case law are examined to address the concerns. Comparative insights from jurisdictions that have adopted different approaches to AI and copyright are also considered. The analysis includes scrutiny of Digital Millennium Copyright Act (DMCA) in the United States, Copyright Directive of the European Union, and other pertinent international treaties. The research offers a fair and balanced method to resolve copyright infringement claims by evaluating the effectiveness of existing legal remedies and arbitration processes. This includes assessing the possibility of amending current legislation to effectively address the distinct difficulties presented by AI, as well as investigating alternate methods of resolving disputes, such as arbitration.

The increasing advancement and widespread integration of AI in different domains of society necessitate immediate consideration of legal consequences associated, specifically regarding copyright violation.⁸ Therefore, this research aims to conduct a thorough examination of the difficulties and possible resolution in resolving copyright issues connected to AI, with a specific focus on civil law concerns. The primary objective is to facilitate the creation of a comprehensive legal method that effectively

⁷ Javier Díaz-Noci, "Artificial Intelligence Systems-Aided News and Copyright: Assessing Legal Implications for Journalism Practices," *Future Internet* 12, no. 5 (May 8, 2020): 85, <https://doi.org/10.3390/fi12050085>.

⁸ Rowena Rodrigues, "Legal and Human Rights Issues of AI: Gaps, Challenges and Vulnerabilities," *Journal of Responsible Technology* 4 (December 2020): 100005, <https://doi.org/10.1016/j.jrt.2020.100005>.

safeguards intellectual property rights while promoting innovation. In this context, a thorough response is offered on the optimal solution and method for selecting the most appropriate alternative dispute resolution mechanisms. The advantages of AI technology are used while upholding the rights of content creators.

2. Problem Statement

This research aims to evaluate the efficacy of current legal remedies and arbitration mechanisms, propose a balanced method for adjudicating AI-related copyright disputes, and provide comprehensive solutions for selecting the most suitable alternative resolution mechanisms. The difficulties and obstacles from liability and adequacy of current legal frameworks to address the issues are considered.

3. Methods

A normative qualitative methodology was adopted using a case and comparison approach by comparing the advantages and weaknesses of dispute resolution mechanism. The research commenced by conducting a comprehensive examination of laws and regulations relevant to the case as the primary data source. Meanwhile, the secondary data were sourced from journals, documents, news, and online media. The case research and recent legal advancements examined were related to copyright infringement committed by AI businesses in digital field. The main emphasis is on legal factors and the different methods used to resolve disputes.

4. Copyright in the Age of Technology: A Legal Perspective on Infringement and Liability

Copyright infringement is a significant concern within the field of intellectual property law, including the unauthorized use of works without the holder's permission.⁹ This is the unauthorized use of copyright holder's exclusive rights, such as duplicating and distributing the work.¹⁰ Copyright infringement is distinct from stealing since the concept includes unauthorized interference with the property rights of another party.¹¹

⁹ Benjamin Alarie, Anthony Niblett, and Albert Yoon, "How Artificial Intelligence Will Affect the Practice of Law," SSRN Scholarly Paper (Rochester, NY, November 7, 2017), <https://doi.org/10.2139/ssrn.3066816>.

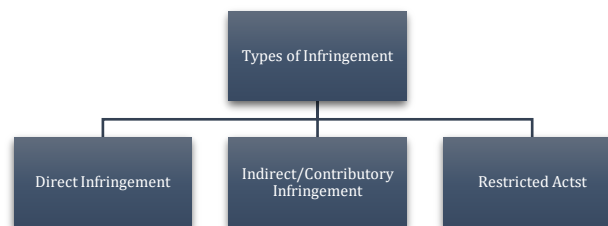
¹⁰ Jonathan Clough, *Principles of Cybercrime*, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2015), <https://doi.org/10.1017/CBO9781139540803>.

¹¹ *Ibid.*

According to Khare et al, the act refers to the unauthorized use of protected works, such as literature, art, drama, music, and sound recordings.¹²

The Universal Copyright Convention (UCC) and the Berne Convention state that copyright infringement pertains to the unpermitted use of a safeguarded creation without the holder of rights. The Berne Convention establishes that copyright protects original works, such as literature, art, and scientific works, and gives exclusive control over the use and distribution of creations.¹³ UCC provides worldwide standards for protecting copyright,¹⁴ where artists have sole ownership of creations and the usage is carried out with proper authorization. The primary purpose is to protect the rights of creators and ensure adequate protection of creative works. There are 3 (three) types of copyright infringement used to determine appropriate liability theories.¹⁵

Figure 1. *Types of Infringement on Copyright*



Copyright infringement is a complex problem categorized into direct and indirect or contributory.¹⁶ Direct infringement refers to the unlawful exercise of copyright owner's bundle of rights.¹⁷ The violation does not necessitate a specific level of awareness in infringing the act. In this context, strict liability is applicable through the violation. Direct infringement is not commonly used to determine the responsibility of a service

¹² Aryan Khare et al., "Artificial Intelligence and Blockchain for Copyright Infringement Detection," in *2023 2nd International Conference on Edge Computing and Applications (ICECAA)* (2023 2nd International Conference on Edge Computing and Applications (ICECAA), Namakkal, India: IEEE, 2023), 492–96, <https://doi.org/10.1109/ICECAA58104.2023.10212277>.

¹³ World Intellectual Property Organization, "Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works" (1886).

¹⁴ UNESCO, "Universal Copyright Convention" (1952).

¹⁵ Matthew M. Chacko, "Service Provider Liability for Copyright Infringement in India: Learning from the American Experience," *Nalsar Law Review* 1, no. 1 (2003): 132.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Séverine Dusollier, "Intellectual Property and the Bundle-of-Rights Metaphor," in *Kritika: Essays on Intellectual Property*, ed. Peter Drahos, Gustavo Ghidini, and Hanns Ullrich, vol. 4 (Edward Elgar Publishing, 2020), 146–79, <https://doi.org/10.4337/9781839101342.00013>.

provider, but may be applicable in certain instances.¹⁸ Meanwhile, indirect or contributory infringement occurs when the defendant intentionally causes or significantly contributes to the behavior.¹⁹ In this context, the offender is aware of the violation of law while engaging in the behavior.²⁰ The doctrine of indirect or contributory infringement is legal concept applied to cases by AI.²¹ This theory of liability holds individuals or entities responsible for indirectly contributing to infringement.

Restricted acts refer to particular actions that violate copyright laws when performed without authorization.²² These activities include duplicating the work, distributing copies, public performance, broadcasting, and making derivatives. Engaging in any of the acts without permission breaches copyright holder's exclusive rights, resulting in legal repercussions.²³ This guarantees that artists retain authority over creations, safeguarding financial and ethical entitlements. The progress of AI technology presents further obstacles, requiring revisions to legal frameworks to tackle direct and indirect infringement.²⁴ For instance, when an AI tool is coded to extract and use copyrighted material without authorization, this action is known as direct infringement. Developers or users of the system may be held responsible after gaining or contributing to the unauthorized use of copyrighted content.²⁵ These challenges should be tackled to

¹⁸ João Pedro Quintais and Sebastian Felix Schwemer, "The Interplay between the Digital Services Act and Sector Regulation: How Special Is Copyright?," *European Journal of Risk Regulation* 13, no. 2 (June 2022): 191–217, <https://doi.org/10.1017/err.2022.1>.

¹⁹ Kanchana Kariyawasam, "Artificial Intelligence and Challenges for Copyright Law," *International Journal of Law and Information Technology* 28, no. 4 (April 11, 2021): 279–96, <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaad023>.

²⁰ Arum Afriani Dewi, "Arbitrase Online Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Pandemi Covid-19," *Jurnal Legal Reasoning* 3, no. 2 (June 30, 2021): 100–115, <https://doi.org/10.35814/jlr.v3i2.2409>.

²¹ Jorge L. Contreras and Martin Husovec, eds., *Injunctions in Patent Law: Trans-Atlantic Dialogues on Flexibility and Tailoring* (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), <https://doi.org/10.1017/9781108891103>.

²² Eleni Polymenopoulou, "Rembrandt's Missing Piece: AI Art and the Fallacies of Copyright Law," *Washington Journal of Law, Technology & Arts* 19, no. 2 (2024): 64–88, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4794932>.

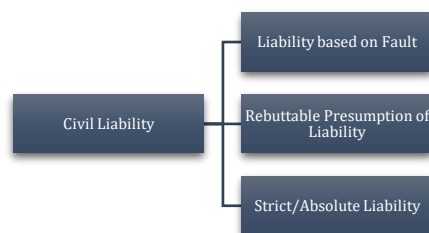
²³ Satria Perdana et al., "Legal Implications for Parties Who Display Inappropriate Content Through Social Media Platforms (Copyright Study)," *KnE Social Sciences*, January 5, 2024, 477–91, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14764>.

²⁴ Xiang Yu et al., "Chapter 8: Challenges of Artificial Intelligence to Patent Law and Copyright Law and Countermeasures," in *The Future of Intellectual Property*, ed. Daniel J. Gervais (Elgar Online, 2021), <https://www.elgaronline.com/edcollchap/edcoll/9781800885332/9781800885332.00014.xml>.

²⁵ Rustam Mutallimzada, "Liability for Copyright Infringement: An Investigation of the Legal Use of Trained Artificial Neural Networks in the Context of Copyright Law" (Master Thesis, Lund, Sweden, Lund

ensure copyright legislation remains up-to-date with technical progress and effectively safeguards the rights of creators in digital era. Considering the different forms of infringement, individuals may inquire who can be trustworthy in relation to the violations. In the context of civil law, there are three distinct principles of civil responsibility.

Figure 2. *Civil Liability Principles*



Civil liability refers to a range of legal principles that hold a party accountable for inflicting injury to another individual.²⁶ Meanwhile, strict or absolute liability is legal principle that holds individuals responsible for damages caused, without requiring proof of fault or negligence.²⁷ This principle is commonly used in instances including activities inherently harmful or defective. The purpose is to ensure that the individuals are held accountable for the expenses of any resulting damages. In the concept of rebuttable presumption of liability, the defendant is responsible but the assumption can be challenged by the presenting evidence to prove otherwise.²⁸ This legal principle is commonly applied in complex issues of causality related to environmental pollution. Additionally, liability predicated on fault necessitates the claimant to establish that the defendant's negligence or deliberate wrongdoing directly resulted in harm.²⁹

Civil responsibility is crucial in protecting intellectual property rights in cases of

University, 2020), <https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordId=9040586&fileId=9040587>.

²⁶ Karolina Ziemianin, "Civil Legal Personality of Artificial Intelligence: Future or Utopia?," *Internet Policy Review* 10, no. 2 (2021): 1–22, <https://doi.org/10.14763/2021.2.1544>.

²⁷ Deviana Yuanitasari, Hazar Kusmayanti, and Agus Suwandono, "A Comparison Study of Strict Liability Principles Implementation for the Product Liability within Indonesian Consumer Protection Law between Indonesia and United States of America Law," *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (December 15, 2023): 2246748, <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2246748>.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Bamidele O. Adebayo, "The Nexus Between Vicarious Liability of Employers and the Acts Committed 'in the Cause of Employment' By The Employees: A Discourse," *Journal of Commercial and Property Law* 8, no. 4 (September 29, 2021): 69–86.

copyright infringement, which is the unauthorized use of work without the consent of the rights holder. Various types can be established based on the specific characteristics of the violation. Holding individuals responsible based on fault is the most appropriate option when determining the most suitable and accurate method to tackle copyright infringement. This process necessitates the rights holder to substantiate that the infringer's activities were deliberate or negligent.³⁰

The concept of liability based on fault is highly appropriate for cases due to the consistency with justice and fairness.³¹ In this context, the infringer's activities are intentional or negligent, with emphasis on awareness and conduct. The method aids in differentiating between accidental and deliberate infringement, guaranteeing that individuals who unintentionally violate are not unjustly punished. For instance, when copyrighted content is intentionally duplicated without permission, the individuals are legally responsible due to culpability, which guarantees suitable remedies for copyright proprietor. This method based on blame strikes a balance between safeguarding intellectual property rights and avoiding severe sanctions for unintentional errors. Responsibility is justly allocated to enhance equal implementation of copyright legislation by mandating the presentation of evidence about intention or negligence. This process promotes increased consciousness and conscientiousness among users of protected material, cultivating an accountable and knowledgeable atmosphere for artists and consumers.

The obligations and potential liabilities of many parties are questioned due to new legal issues. AI developers may face legal responsibility for creating systems with the potential to violate intellectual property rights, while users are held accountable for using AI in the concept of infringement. The simultaneous emphasis on developers and users shows the intricacy of overseeing intellectual property concerns associated with AI. Conversely, China has initiated a significant legal proceeding about internet

³⁰ Laura Tammenlehto, "Copyright Compensation in the Finnish Sanctioning System – A Remedy for Ungained Benefit or an Unjustified Punishment?," *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law* 53, no. 6 (July 1, 2022): 883–916, <https://doi.org/10.1007/s40319-022-01206-6>.

³¹ Jella Pfeiffer et al., "Algorithmic Fairness in AI," *Business & Information Systems Engineering* 65, no. 2 (April 1, 2023): 209–22, <https://doi.org/10.1007/s12599-023-00787-x>.

copyright infringement.³² The case includes Shanghai Character License Administrative Co., Ltd (SCLA), and an AI Generative Company as the plaintiff and defendant, respectively.³³ According to the plaintiff, the AI-generated graphics have violated exclusive rights to the Ultraman franchise.

The court's ruling showed the responsibility of AI service provider even though the model was created by a third-party supplier. The decision shows the substantial responsibility of service providers to exercise caution. The defendant was responsible for infringement results produced by the model. The verdict emphasizes that operators cannot fully delegate obligations to third-party developers. In this context, individuals must proactively reduce the risks of copyright violation connected to the use of the models.

The decision shows the responsibility of AI service provider, even though the model was created by a third-party supplier. Furthermore, the ruling established that the operator was accountable for the infringing outputs. This portion of the verdict reports the intricacy of liability since there are several parties in the development and operation of the systems. In addition, the ruling establishes legal principle, where individuals responsible for operating AI can be held accountable for the outcomes produced by models created by other parties.

5. Legal Pitfalls and Protections: Dispute Resolution in AI Enterprises

The selection of dispute resolution mechanisms on digital platforms necessitates adherence to the legislation of the jurisdiction in which the company is incorporated,³⁴ as stated in the Terms and Conditions (TnC). The selection of mechanisms on the Generative AI platform, as frequently showed in TnC is a significant matter of concern, affecting the applicable jurisdiction and the venue for resolving disputes. This is

³² Christine Yiu and Toby Bond, "Liability of AI Service Providers for Copyright Infringement: Guangzhou Internet Court Reaches World's First Decision," April 10, 2024, <https://www.twobirds.com/en/insights/2024/china/liability-of-ai-service-providers-for-copyright-infringement>.

³³ Kyril, "Chinese Court Takes on First Copyright Case Against Generative AI Platform," *LegalTechTalk* (blog), March 4, 2024, <https://www.legaltech-talk.com/chinese-court-takes-on-first-copyright-case-against-generative-ai-platform/>.

³⁴ Stefan Vogenauer, "Regulatory Competition through Choice of Contract Law and Choice of Forum in Europe: Theory and Evidence," *European Review of Private Law* 21, no. 1 (January 1, 2013): 13-78.

particularly important since generative AI includes cross-jurisdictional contacts during the development and usage. AI systems determine dispute resolution based on geographical location, as shown in Table 1.

Table 1. Selection of AI dispute resolution for Multiple AI Companies Worldwide

AI	Dispute Resolution Mechanism	
Open AI	Law of the State of California	Resolving Case through Arbitration under the Law of the State of California
Assembly AI	Law of the State of California	Resolving Cases through Arbitration and Court under the Law of the State of California
Cohere	Law of the Province of Ontario and the Federal Laws of Canada	Resolving Cases through Arbitration and Court under the Law of the Province of Ontario and the Federal Laws of Canada
Synthesia AI	Law of England and Wales	Resolving Cases through Arbitration and Court under the Law of England and Wales
Stability AI	Law of the State of New York	Resolving CaseCases through Arbitration an/orand Court under the Law of the State of New York
Google Bard	Law of the State of Delaware, USA	Resolving Cases through Arbitration and Court under the Law of the State of Delaware, USA
Prompt Base	Law of the State of Washington	Resolving Cases through Arbitration and Court under the Law of the State of Washington, USA
Character AI	Law of the State of California	Resolving Cases through Arbitration and Court under the Law of the State of California

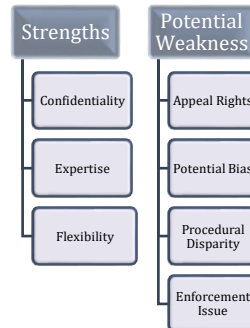
Source: Secondary Data Processed in 2024

Arbitration is a crucial element of dispute resolution method determined by the AI company. This method includes the selection of a neutral arbitrator whose decision is important and can be enforced. Arbitration is commonly preferred in technology-driven industries because of the capacity to effectively resolve intricate and technical conflicts.³⁵ The AI corporation has implemented the mandatory concept as the principal mechanisms for resolving disputes in a regulated and expert-guided setting. The purpose is to simplify the process of resolving disputes, using the expertise of

³⁵ Victor Enebeli and Success Gilbert, "Artificial Intelligence: Challenges and Opportunities for Arbitration in Nigeria," *Journal of Public Law* 9, no. 2 (2022): 23–41, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4245238>.

arbitrators to efficiently handle the complexities of AI-related concerns. However, these mechanisms produced strengths and weaknesses as shown in Figure 3.³⁶

Figure 3. Strengths and Weakness of Arbitration by AI Companies



The first aspect to consider is the strengths of the selected arbitration process, which provides benefits, specifically in terms of confidentiality, expertise, and flexibility.³⁷ The proceedings maintain confidentiality, safeguarding critical corporate information and proprietary AI technology from being disclosed to the public. Ensuring confidentiality is important in protecting exclusive information and retaining a competitive advantage.³⁸ In this context, the rigorous arbitration procedure guarantees the confidentiality of all aspects of dispute, such as the evidence submitted and the verdict to safeguard the reputation and commercial concerns of the parties. Another significant advantage is the capability to select arbitrators who possess specialized knowledge in the fields of AI and intellectual property law. This guarantees that the arbitrator possesses a profound comprehension of the technical and legal intricacies associated with dispute, resulting in more knowledgeable and precise rulings.³⁹

The process enables parties to select arbitrators who possess extensive knowledge and expertise in the intricacies of AI technology.⁴⁰ This specific skill has the potential to

³⁶ Ioannis Antonopoulos et al., “Artificial Intelligence and Machine Learning Approaches to Energy Demand-Side Response: A Systematic Review,” *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 130 (September 1, 2020): 109899, <https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.109899>.

³⁷ Yusuf Olaoluwa, “Analysis of the Strengths and Weaknesses of Alternative Dispute Resolution (ADR) in Commercial Disputes” (Academia.edu, February 2019), <https://doi.org/10.1093/law-mpeipro/e2532.013.2532>.

³⁸ Sara Quach et al., “Digital Technologies: Tensions in Privacy and Data,” *Journal of the Academy of Marketing Science* 50, no. 6 (November 1, 2022): 1299–1323, <https://doi.org/10.1007/s11747-022-00845-y>.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Maxime C Cohen, Samuel Dahan, and Colin Rule, “Conflict Analytics: When Data Science Meets Dispute Resolution,” *Conflict Analytics*, accessed June 27, 2024,

improve the quality and impartiality of arbitration,⁴¹ which provides a level of adaptability.⁴² Therefore, the parties can reach a consensus on the regulations governing the procedure, which includes the methods for presenting evidence and the timeframe for reaching a result.⁴³ The flexibility of the conflict resolution process enables customization according to the requirements and limitations of the parties, resulting in enhanced adaptability and efficiency.

On the contrary, arbitration established by the AI business has different limitations, specifically with the rights to appeal, potential partiality, and challenges related to enforcement.⁴⁴ A major issue is the restricted basis for appeal since the arbitrator's ruling is conclusive and obligatory, providing little chance for redress. This situation provides difficulties when the decision is viewed as unreasonable or prejudiced, resulting in unhappiness among the parties. An additional major problem is the possibility of bias since the neutrality of arbitrators may be questioned, particularly when the same arbitrators are selected by one party. In this context, the AI company must provide a transparent selection procedure for arbitrators and uphold diversity and impartiality to reduce the danger.

The implementation of arbitration rulings can pose challenges because legal criteria and methods for enforcement exist in different countries.⁴⁵ This results in legal obstacles and delays, which complicate the implementation of arbitration rulings. To enhance the fairness and dependability of the arbitration process, the AI company needs to tackle enforcement problems by implementing explicit guidelines and support mechanisms.

<https://conflictanalytics.queenslaw.ca/sites/cawww/files/img/research/Conflict%20Analytics-MBR-Revised-Version.pdf>.

⁴¹ Ilka Hanna Beimel, "Independence and Impartiality in International Commercial Arbitration" (Thesis, Basel, Switzerland, University of Basel, 2021), <https://edoc.unibas.ch/87369/>.

⁴² Kevin Kotadiya and Ishita Agrawal, "Efficient Verification of Arbitration Design with a Generic Model," in *DVCon Proceedings Archive* (Design & Verification Conference & Exhibition, India: DVCon, n.d.), https://dvcon-proceedings.org/wp-content/uploads/3A2_DVCon_India_2023_Final_Paper_6347.pdf.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Nicole Borba Oliveira, "The Role of International Arbitration in Resolving Cross-Border Smart Contract Disputes: Opportunities and Challenges" (Dissertation, Lisboa, Portugal, NOVA School of Law, 2023).

⁴⁵ Zebiniso Khalilova, "Practice of Commercial Arbitration and Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards Concerning Disputes in Uzbekistan: A Comparison with Germany" (Dissertation, Bremen, Germany, Universität Bremen, 2020), <https://media.suub.uni-bremen.de/handle/elib/4536>.

An important limitation of the process is the possibility that a party may lack knowledge of the procedural regulations.⁴⁶ This lack of familiarity results in misunderstandings and errors impacting the fairness of the final decision. Arbitration adheres to the procedural laws of the state, placing parties at a disadvantage when there is no familiarity with the laws.⁴⁷ Moreover, insufficient knowledge leads to unintentional relinquishment of rights or ineffective presentation of cases. The procedural regulations can be intricate and differ substantially among jurisdictions, potentially resulting in mistakes. Unfamiliar parties may be required to engage the services of local legal professionals to navigate the procedure, resulting in higher expenses and an unequal situation when a party secures superior legal counsel.⁴⁸ The validity of the conclusion is undermined when the arbitration process is biased or opaque. In this context, a lack of procedural procedures leads to feelings of unfairness and absence of transparency.

The procedural requirements include precise deadlines, regulations about the acceptability of evidence, or special guidelines for submitting materials distinct from other legal systems. An individual or group that is not aware of these specific regulations may overlook important time limits or struggle to effectively convey an argument, hence weakening the position in the arbitration process. This limitation is severe in international situations, where parties from various legal systems are engaged. The discrepancy in legal expertise and background is evident when individuals come from legal systems with distinct methods of arbitration and resolving disputes.⁴⁹

The arbitration of a hypothetical scenario takes place in California where a European AI startup is engaged in conflict with a prominent AI corporation. The European startup

⁴⁶ Hafiz Gaffar and Saleh Albarashdi, "Copyright Protection for AI-Generated Works: Exploring Originality and Ownership in a Digital Landscape," *Asian Journal of International Law*, January 23, 2024, 1–24, <https://doi.org/10.1017/S2044251323000735>.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ilias Bantekas, "Equal Treatment of Parties in International Commercial Arbitration," *International & Comparative Law Quarterly* 69, no. 4 (October 2020): 991–1011, <https://doi.org/10.1017/S0020589320000287>.

⁴⁹ Alireza Abin, Zeinab Haghtalab, and Hadi Ghorbani, "Examining the Provisional Order in Arbitration in Domestic Law, Explaining the Needs, Gaps, and Harms of the Current Situation," *Russian Law Journal* 11, no. 10S (2023): 223–36.

lacks familiarity with special Californian procedural requirements, such as discovery regulations, which are significantly different from Europe. Unfamiliarity with the process may lead to procedural errors, such as neglecting to obtain essential research within the specified timeframe or underestimating the significance of certain preparatory motions.

The intricacies of maneuvering through procedures in various legal systems may necessitate significant legal knowledge and resources.⁵⁰ The requirement for expert legal representation to interpret and adhere to procedural prerequisites substantially increases the expenses and intricacy of the arbitration procedure for the party lacking familiarity with regional legislation.⁵¹ Smaller companies or those with limited resources may face difficulties in affording such expertise, resulting in an imbalance. In this context, a party may have a superior understanding of the local procedural intricacies to unintentionally gain an advantage.⁵²

This scenario leads to a situation in which the local party can take advantage of complex procedural details. For instance, the position may be strategically enhanced by preparing cases accordingly when there is awareness relating to the specific evidence. The difference in understanding of procedures leads to the perception of injustice and prejudice, weakening the credibility and acceptance of arbitration decisions.

The process of enforcing arbitration rulings can be intricate, particularly in cases of multinational disputes. The presence of varying legal requirements and enforcement procedures in different jurisdictions creates complexities in the process. For example, an arbitration award issued in California may encounter difficulties in being enforced in Europe because of disparities in handling the rulings.⁵³ The foreign party may be

⁵⁰ Nurus Sakinatul Fikriah Mohd Shith Putera et al., "Artificial Intelligence for Construction Dispute Resolution: Justice of the Future," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 11, no. 11 (November 6, 2021): 139–51, <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v11-i11/11263>.

⁵¹ Oleksii Makarenkov and Lurdes Varregoso Mesquita, "Challenges of Legal Guarantees for the Enforcement of Arbitral Awards in International Commercial Cases," *Access to Justice in Eastern Europe* 7, no. 1 (December 20, 2023): 107–26, <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-7.1-a000133>.

⁵² Ibid.

⁵³ Jef Klazen, Marcus J Green, and Chris Cogburn, "Enforcement in the United States," October 13, 2020, <https://globalarbitrationreview.com/review/the-arbitration-review-of-the-americas/2021/article/enforcement-in-the-united-states>.

subjected to a distinct legal procedure to enforce the award, which adds complexity to the settlement and potentially results in a delay in achieving justice.⁵⁴

Historical precedents showed that litigants lacking knowledge of local procedural laws frequently encountered difficulties. In the well-known dispute between Mitsubishi Motors Corp. and Soler Chrysler-Plymouth, Inc., the U.S. Supreme Court recognized the intricate challenges when arbitration includes multinational parties and is conducted under procedural standards. The Court affirmed the validity of the arbitration agreement and emphasized challenges encountered by foreign parties.

AI company must furnish sufficient direction and support to minimize potential hazards and guarantee an equitable procedure. These offerings include comprehensive step-by-step instructions, provision of local legal specialists, or preparatory educational workshops on procedural laws to acquaint foreign entities with applicable regulations.⁵⁵ To maintain fairness, transparency, and effectiveness, proactive measures should be taken to resolve possible shortcomings.

6. Cross-Border Conflicts: WIPO's Approach to AI Intellectual Property Disputes

The World Intellectual Property (WIPO) Arbitration and Mediation Center provides a specific structure for addressing disputes, including cases of copyright infringement by AI businesses.⁵⁶ With the ongoing proliferation and deeper integration of technology across many industries, there has been an increase in the number of copyright-related issues. These conflicts frequently revolve around intricate technical matters and significant proprietary concerns, showing the need for quick and equitable processes for resolution. WIPO's system, which is created to address cross-border conflicts offers a customized resolution for the types of problems.⁵⁷ However, dispute resolution process is not exempt from critiques and possible shortcomings, despite the numerous

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Panchenko Viktoriia and Kornieva Polina and Cherevatenko Iryna, "Procedural Law Role in the International Commercial Arbitration: Some Remarks," *Issue 4/2022* 4, no. 16 (November 14, 2022): 187–200.

⁵⁶ Ay Yunus Emre, "Intellectual Property Disputes and International Arbitration," *Zbornik Radova Pravnog Fakulteta u Splitu* 58, no. 3 (September 7, 2021): 929–41, <https://doi.org/10.31141/zrpf.2021.58.141.929>.

⁵⁷ Ibid.

advantages.

The benefits of resolution include several aspects such as cost-effectiveness and expeditiousness, adaptability and autonomy, confidentiality, fair outcomes driven by experts, acceptance by multiple parties, and a less confrontational method.⁵⁸ Resolution methods overseen by WIPO are more expeditious and economical in comparison to conventional court action. For example, disputes considered under the Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) need approximately two months from the time of filing to the panel's conclusion.⁵⁹ This timeframe is shorter compared to the 1-2 years that similar matters may take in national courts.⁶⁰ Resolution is significantly more cost-effective than court proceedings, serving as a highly appealing choice. In addition, the concept empowers parties to customize the procedure according to the particular requirements and retain authority over the final result. The ability to select arbitrators or mediators with specialized knowledge of intellectual property issues is advantageous.⁶¹ This customized strategy facilitates the attainment of outcomes more suited to the parties' interests and the unique intricacies of conflicts.

Dispute resolution provided by WIPO gives the advantage of confidentiality conducted privately and discreetly.⁶² This ensures that critical technological and financial matters remain undisclosed to the public, safeguarding the interests of the relevant parties. In addition, dispute resolution services use arbitrators, mediators, and experts who possess extensive expertise and technical proficiency in intellectual property. This level of proficiency results in fairer outcomes and expedited resolution to reduce costs and minimize exertion.⁶³ The widespread adoption and streamlined application of

⁵⁸ Arnita Pratiwi Arifin, "An Analysis of the Role of World Intellectual Property Organisation and the Alternative Dispute Resolution in Implementing the Protection of Intellectual Property Rights in the Internet Era" (Thesis, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2016).

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Yuchen Wen, "The Role of WIPO and WTO in International Intellectual Property Disputes" (International Conference on Educational Innovation and Philosophical Inquiries, Eliwise Academy, 2021), 50-57.

⁶² Arifin, "An Analysis of the Role of World Intellectual Property Organisation and the Alternative Dispute Resolution in Implementing the Protection of Intellectual Property Rights in the Internet Era."

⁶³ *Ibid.*

alternative dispute resolution procedures, such as UDRP by WIPO is deserving of attention.⁶⁴ These processes are acknowledged and embraced in various legal systems, aiding in resolution of international conflicts by mitigating issues on the selection of applicable laws or jurisdictions. In contrast to court proceedings, ADR achieves optimal resolution, potentially maintaining stronger connections. The less adversarial nature enhances peaceful agreements and minimizes negative emotions, as a collaborative and non-confrontational strategy for resolving disputes.

The limitations of dispute resolution are related to several significant objections and concerns. A significant critique of WIPO's UDRP is the susceptibility to prejudice, permitting complainants to select the providers or panelists for resolving disputes.⁶⁵ This results in 'forum shopping,' where individuals filing complaints select providers or panelists who are more inclined to support personal interests.⁶⁶ The selection procedure gives rise to issues over the fairness of the process and the possibility of outcomes being swayed by the complainants' preferences. In addition, UDRP process does not include provisions for discovery or the opportunity to present arguments for damages and causation as allowed in conventional court proceedings.⁶⁷ This constraint leads to a less exhaustive investigation and perhaps impacts the impartiality and comprehensiveness of the solution. The absence of procedural rights provides a substantial disadvantage for parties desiring a more comprehensive investigation of the issues.

Dispute resolution services fail to sufficiently tackle the disparity in access to digital resources between developed, developing, and least-developed countries (LDCs).⁶⁸ This disparity impacts the accessibility and equity of dispute resolution procedures for

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Nirmalya Syam, "Mainstreaming or Dilution? Intellectual Property and Development in WIPO," Research Report (Research Paper, 2019), <https://www.econstor.eu/handle/10419/232214>.

⁶⁶ Arifin, "An Analysis of the Role of World Intellectual Property Organisation and the Alternative Dispute Resolution in Implementing the Protection of Intellectual Property Rights in the Internet Era."

⁶⁷ Shelly Kurniawan, "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan World Intellectual Proper," *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, no. 1 (November 19, 2019): 97-113, <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1972>.

⁶⁸ Ibid.

parties from underdeveloped regions. The discrepancy results in an asymmetry in the capacity to engage in the alternative dispute resolution process and may lead to less fair outcomes for individuals from less economically advanced regions. Meanwhile, conventional methods may not possess the necessary resources and capabilities to effectively address the distinctive difficulties and intricacies of conflicts.⁶⁹ This includes addressing behaviors and attitudes that are absent in the tangible realm, necessitating a reassessment and modification of dispute resolution mechanisms for the virtual setting.⁷⁰ ADR processes should also be adapted to the internet environment to effectively deal with the changing character of disputes. Resolution services of WIPO provide a useful method of resolving intellectual property disputes. However, obstacles are encountered concerning potential prejudice, inadequate procedural rights, difficulties in digital accessibility, and adaption to the online context.⁷¹ The shortcomings should be rectified to improve the efficiency and impartiality of the alternative resolution system offered by WIPO. In this context, the concept continues to be a viable and just method for settling intellectual property conflicts in a digitalized society.

The method of WIPO is strong compared to other dispute resolution systems provided by AI businesses. The established structure shows that disputes are resolved by impartial experts who possess extensive expertise in intellectual property, minimizing the probability of biased results. Moreover, the preservation of confidentiality is crucial for safeguarding delicate business data and upholding the credibility of the participating companies. This aspect may not be as strictly upheld in the internal mechanisms used by AI companies.

Dispute resolution process of WIPO is globally acknowledged, offering a degree of

⁶⁹ Hossein Fazilatfar, "Public Policy Norms and Choice-of-Law Methodology Adjustments in International Arbitration," *South Carolina Journal of International Law and Business* 18, no. 2 (2022): 88–111, <https://doi.org/10.2139/ssrn.4152321>.

⁷⁰ Jr Albert Bates and R. Zachary Torres-Fowler, "Internationalizing Domestic Arbitration: How International Arbitration Practices Can Improve Domestic Construction Arbitration," *Dispute Resolution Journal* 74, no. 3 (March 1, 2019), <https://kluwerlawonline.com/api/Product/CitationPDFURL?file=Journals\DRJ\DRJ2020017.pdf>.

⁷¹ Hugo Cossette-Lefebvre and Jocelyn Maclure, "AI's Fairness Problem: Understanding Wrongful Discrimination in the Context of Automated Decision-Making," *AI and Ethics* 3, no. 4 (November 1, 2023): 1255–69, <https://doi.org/10.1007/s43681-022-00233-w>.

universality and recognition not possessed by the internal mechanisms of AI company. This agreement among many parties helps to overcome legal issues related to jurisdiction and guarantees that decisions are honored and enforced to make the process of resolving disputes more efficient and predictable.⁷² Moreover, the non-confrontational character promotes greater cooperation and mutually advantageous settlements, safeguarding commercial connections and cultivating a favorable atmosphere for future engagements. Dispute resolution of WIPO is a preferable choice for settling intricate copyright disputes in the AI industry due to the characteristics. The process offers a broader, unbiased, confidential, and equitable method for addressing copyright disputes including AI businesses.

7. Conclusion

In conclusion, the WIPO Arbitration and Mediation Center was reported to provide a comprehensive structure for resolving intellectual property issues relating to copyright infringement in AI. Resolution system had several benefits including cost-effectiveness, rapidity, adaptability, and confidentiality. In this context, the system was backed by experienced arbitrators and mediators. Alternative dispute resolution methods were typically more efficient and cost-effective compared to traditional court litigation. Additionally, the anonymity of hearings safeguarded important company information. The ADR services were driven by expertise, where conflict was settled by knowledgeable professionals to obtain fairer decisions.

Dispute settlement procedure was distinguished by the use of knowledge, adherence to strict confidentiality rules, as well as commitment to impartial and adaptable methods. The identified deficiencies were addressed and continuously improved to strengthen the effectiveness and fairness of the system. Therefore, the system remained the preferred alternative for resolving intellectual property disputes in a rapidly evolving digital era.

⁷² Abubakar Aliyu et al., "Level of Awareness of Copyright Law and Infringement by Students of Tertiary Institutions in Niger State, Nigeria," *Jewel Journal of Librarianship* 16, no. 1 (2021): 51–63.

References

- Abin, Alireza, Zeinab Haghtalab, and Hadi Ghorbani. "Examining the Provisional Order in Arbitration in Domestic Law, Explaining the Needs, Gaps, and Harms of the Current Situation." *Russian Law Journal* 11, no. 10S (2023): 223–36.
- Adebayo, Bamidele O. "The Nexus Between Vicarious Liability of Employers and the Acts Committed 'in the Cause of Employment' By The Employees: A Discourse." *Journal of Commercial and Property Law* 8, no. 4 (September 29, 2021): 69–86.
- Alarie, Benjamin, Anthony Niblett, and Albert Yoon. "How Artificial Intelligence Will Affect the Practice of Law." SSRN Scholarly Paper. Rochester, NY, November 7, 2017. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3066816>.
- Albert Bates, Jr, and R. Zachary Torres-Fowler. "Internationalizing Domestic Arbitration: How International Arbitration Practices Can Improve Domestic Construction Arbitration." *Dispute Resolution Journal* 74, no. 3 (March 1, 2019). <https://kluwerlawonline.com/api/Product/CitationPDFURL?file=Journals\DRJ\DRJ2020017.pdf>.
- Aliyu, Abubakar, Mohammed Saba, Shehu Gani, and Fatima Ladan. "Level of Awareness of Copyright Law and Infringement by Students of Tertiary Institutions in Niger State, Nigeria." *Jewel Journal of Librarianship* 16, no. 1 (2021): 51–63.
- Antonopoulos, Ioannis, Valentin Robu, Benoit Couraud, Desen Kirli, Sonam Norbu, Aristides Kiprakis, David Flynn, Sergio Elizondo-Gonzalez, and Steve Wattam. "Artificial Intelligence and Machine Learning Approaches to Energy Demand-Side Response: A Systematic Review." *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 130 (September 1, 2020): 109899. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.109899>.
- Arifin, Arnita Pratiwi. "An Analysis of the Role of World Intellectual Property Organisation and the Alternative Dispute Resolution in Implementing the Protection of Intellectual Property Rights in the Internet Era." Thesis, Universitas Hasanuddin, 2016.
- Atanasova, Irina. "Copyright Infringement in Digital Environment." *Economics & Law* 1, no. 1 (2019): 13–22.

- Bantekas, Ilias. "Equal Treatment of Parties in International Commercial Arbitration." *International & Comparative Law Quarterly* 69, no. 4 (October 2020): 991–1011. <https://doi.org/10.1017/S0020589320000287>.
- Beimel, Ilka Hanna. "Independence and Impartiality in International Commercial Arbitration." Thesis, University of Basel, 2021. <https://edoc.unibas.ch/87369/>.
- Chacko, Matthew M. "Service Provider Liability for Copyright Infringement in India: Learning from the American Experience." *Nalsar Law Review* 1, no. 1 (2003): 131–39.
- Clough, Jonathan. *Principles of Cybercrime*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2015. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139540803>.
- Cohen, Maxime C, Samuel Dahan, and Colin Rule. "Conflict Analytics: When Data Science Meets Dispute Resolution." *Conflict Analytics*. Accessed June 27, 2024. <https://conflictanalytics.queenslaw.ca/sites/cawww/files/img/research/Conflict%20Analytics-MBR-Revised-Version.pdf>.
- Contreras, Jorge L., and Martin Husovec, eds. *Injunctions in Patent Law: Trans-Atlantic Dialogues on Flexibility and Tailoring*. Cambridge: Cambridge University Press, 2022. <https://doi.org/10.1017/9781108891103>.
- Cossette-Lefebvre, Hugo, and Jocelyn Maclure. "AI's Fairness Problem: Understanding Wrongful Discrimination in the Context of Automated Decision-Making." *AI and Ethics* 3, no. 4 (November 1, 2023): 1255–69. <https://doi.org/10.1007/s43681-022-00233-w>.
- Cui, Yadong. *Artificial Intelligence and Judicial Modernization*. Singapore: Springer, 2020. <https://doi.org/10.1007/978-981-32-9880-4>.
- Desai, Deven R., and Mark Riedl. "Between Copyright and Computer Science: The Law and Ethics of Generative AI." arXiv, 2024. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.2403.14653>.
- Dewi, Arum Afriani. "Arbitrase Online Di Era Revolusi Industri 4.0 Dan Pandemi Covid-19." *Jurnal Legal Reasoning* 3, no. 2 (June 30, 2021): 100–115. <https://doi.org/10.35814/jlr.v3i2.2409>.

- Díaz-Noci, Javier. "Artificial Intelligence Systems-Aided News and Copyright: Assessing Legal Implications for Journalism Practices." *Future Internet* 12, no. 5 (May 8, 2020): 85. <https://doi.org/10.3390/fi12050085>.
- Dusollier, Séverine. "Intellectual Property and the Bundle-of-Rights Metaphor." In *Kritika: Essays on Intellectual Property*, edited by Peter Drahos, Gustavo Ghidini, and Hanns Ullrich, 4:146–79. Edward Elgar Publishing, 2020. <https://doi.org/10.4337/9781839101342.00013>.
- Emre, Ay Yunus. "Intellectual Property Disputes and International Arbitration." *Zbornik Radova Pravnog Fakulteta u Splitu* 58, no. 3 (September 7, 2021): 929–41. <https://doi.org/10.31141/zrpf.2021.58.141.929>.
- Enebeli, Victor, and Success Gilbert. "Artificial Intelligence: Challenges and Opportunities for Arbitration in Nigeria." *Journal of Public Law* 9, no. 2 (2022): 23–41. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4245238>.
- Fazilatfar, Hossein. "Public Policy Norms and Choice-of-Law Methodology Adjustments in International Arbitration." *South Carolina Journal of International Law and Business South Carolina Journal of International Law and Business* 18, no. 2 (2022): 88–111. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4152321>.
- Fenwick, Mark, and Paulius Jurcys. "Originality and the Future of Copyright in an Age of Generative AI." *Computer Law & Security Review* 51 (November 1, 2023): 105892. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2023.105892>.
- Gaffar, Hafiz, and Saleh Albarashdi. "Copyright Protection for AI-Generated Works: Exploring Originality and Ownership in a Digital Landscape." *Asian Journal of International Law*, January 23, 2024, 1–24. <https://doi.org/10.1017/S2044251323000735>.
- Igbinenikaro, Etinosa, and Adefolake Olachi Adewusi. "Navigating the Legal Complexities of Artificial Intelligence in Global Trade Agreements." *International Journal of Applied Research in Social Sciences* 6, no. 4 (April 7, 2024): 488–505. <https://doi.org/10.51594/ijarss.v6i4.987>.
- Kariyawasam, Kanchana. "Artificial Intelligence and Challenges for Copyright Law." *International Journal of Law and Information Technology* 28, no. 4 (April 11, 2021): 279–96. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eeee023>.

- Khalilova, Zebiniso. "Practice of Commercial Arbitration and Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards Concerning Disputes in Uzbekistan: A Comparison with Germany." Dissertation, Universität Bremen, 2020. <https://media.suub.uni-bremen.de/handle/elib/4536>.
- Khare, Aryan, Ujjwal Kumar Singh, Samta Kathuria, Shaik Vaseem Akram, Manish Gupta, and Navjot Rathor. "Artificial Intelligence and Blockchain for Copyright Infringement Detection." In *2023 2nd International Conference on Edge Computing and Applications (ICECAA)*, 492–96. Namakkal, India: IEEE, 2023. <https://doi.org/10.1109/ICECAA58104.2023.10212277>.
- Klazen, Jef, Marcus J Green, and Chris Cogburn. "Enforcement in the United States," October 13, 2020. <https://globalarbitrationreview.com/review/the-arbitration-review-of-the-americas/2021/article/enforcement-in-the-united-states>.
- Kotadiya, Kevin, and Ishita Agrawal. "Efficient Verification of Arbitration Design with a Generic Model." In *DVCon Proceedings Archive*. India: DVCon, n.d. https://dvcon-proceedings.org/wp-content/uploads/3A2_DVCon_India_2023_Final_Paper_6347.pdf.
- Kurniawan, Shelly. "Perbandingan Penyelesaian Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dengan World Intellectual Proper." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi* 11, no. 1 (November 19, 2019): 97–113. <https://doi.org/10.28932/di.v11i1.1972>.
- Kyryl. "Chinese Court Takes on First Copyright Case Against Generative AI Platform." *LegalTechTalk* (blog), March 4, 2024. <https://www.legaltech-talk.com/chinese-court-takes-on-first-copyright-case-against-generative-ai-platform/>.
- Makarenkov, Oleksii, and Lurdes Varregoso Mesquita. "Challenges of Legal Guarantees for the Enforcement of Arbitral Awards in International Commercial Cases." *Access to Justice in Eastern Europe* 7, no. 1 (December 20, 2023): 107–26. <https://doi.org/10.33327/AJEE-18-7.1-a000133>.

- Mohd Shith Putera, Nurus Sakinatul Fikriah, Hartini Sariipan, Rafizah Abu Hassan, and Sarah Munirah Abdullah. "Artificial Intelligence for Construction Dispute Resolution: Justice of the Future." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 11, no. 11 (November 6, 2021): 139–51. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v11-i11/11263>.
- Mutallimzada, Rustam. "Liability for Copyright Infringement: An Investigation of the Legal Use of Trained Artificial Neural Networks in the Context of Copyright Law." Master Thesis, Lund University, 2020. <https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordId=9040586&fileId=9040587>.
- Olaoluwa, Yusuf. "Analysis of the Strengths and Weaknesses of Alternative Dispute Resolution (ADR) in Commercial Disputes." Academia.edu, February 2019. <https://doi.org/10.1093/law-mpeipro/e2532.013.2532>.
- Oliveira, Nicole Borba. "The Role of International Arbitration in Resolving Cross-Border Smart Contract Disputes: Opportunities and Challenges." Dissertation, NOVA School of Law, 2023.
- Perdana, Satria, Saidin, Budiman Ginting, and T. Keizerina Devi. "Legal Implications for Parties Who Display Inappropriate Content Through Social Media Platforms (Copyright Study)." *KnE Social Sciences*, January 5, 2024, 477–91. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14764>.
- Pfeiffer, Jella, Julia Gutschow, Christian Haas, Florian Möslein, Oliver Maspfuhl, Frederik Borgers, and Suzana Alpsancar. "Algorithmic Fairness in AI." *Business & Information Systems Engineering* 65, no. 2 (April 1, 2023): 209–22. <https://doi.org/10.1007/s12599-023-00787-x>.
- Polymenopoulou, Eleni. "Rembrandt's Missing Piece: AI Art and the Fallacies of Copyright Law." *Washington Journal of Law, Technology & Arts* 19, no. 2 (2024): 64–88. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4794932>.
- Quach, Sara, Park Thaichon, Kelly D. Martin, Scott Weaven, and Robert W. Palmatier. "Digital Technologies: Tensions in Privacy and Data." *Journal of the Academy of Marketing Science* 50, no. 6 (November 1, 2022): 1299–1323. <https://doi.org/10.1007/s11747-022-00845-y>.

- Quintais, João Pedro, and Sebastian Felix Schwemer. "The Interplay between the Digital Services Act and Sector Regulation: How Special Is Copyright?" *European Journal of Risk Regulation* 13, no. 2 (June 2022): 191–217. <https://doi.org/10.1017/err.2022.1>.
- Rodrigues, Rowena. "Legal and Human Rights Issues of AI: Gaps, Challenges and Vulnerabilities." *Journal of Responsible Technology* 4 (December 2020): 100005. <https://doi.org/10.1016/j.jrt.2020.100005>.
- Syam, Nirmalya. "Mainstreaming or Dilution? Intellectual Property and Development in WIPO." Research Report. Research Paper, 2019. <https://www.econstor.eu/handle/10419/232214>.
- Tammenlehto, Laura. "Copyright Compensation in the Finnish Sanctioning System – A Remedy for Ungained Benefit or an Unjustified Punishment?" *IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law* 53, no. 6 (July 1, 2022): 883–916. <https://doi.org/10.1007/s40319-022-01206-6>.
- UNESCO. Universal Copyright Convention (1952).
- Viktoriia, Panchenko, and Kornieva Polina and Cherevatenko Iryna. "Procedural Law Role in the International Commercial Arbitration: Some Remarks." *Issue 4/2022* 4, no. 16 (November 14, 2022): 187–200.
- Vogenauer, Stefan. "Regulatory Competition through Choice of Contract Law and Choice of Forum in Europe: Theory and Evidence." *European Review of Private Law* 21, no. 1 (January 1, 2013): 13–78.
- Wen, Yuchen. "The Role of WIPO and WTO in International Intellectual Property Disputes," 50–57. Eliwise Academy, 2021.
- World Intellectual Property Organization. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (1886).
- Yiu, Christine, and Toby Bond. "Liability of AI Service Providers for Copyright Infringement: Guangzhou Internet Court Reaches World's First Decision," April 10, 2024. <https://www.twobirds.com/en/insights/2024/china/liability-of-ai-service-providers-for-copyright-infringement>.
- Yu, Xiang, Runzhe Zhang, Ben Zhang, and Hua Wang. "Chapter 8: Challenges of Artificial Intelligence to Patent Law and Copyright Law and Countermeasures." In *The*

Future of Intellectual Property, edited by Daniel J. Gervais. Elgar Online, 2021.
<https://www.elgaronline.com/edcollchap/edcoll/9781800885332/9781800885332.00014.xml>.

Yuanitasari, Deviana, Hazar Kusmayanti, and Agus Suwandono. "A Comparison Study of Strict Liability Principles Implementation for the Product Liability within Indonesian Consumer Protection Law between Indonesia and United States of America Law." *Cogent Social Sciences* 9, no. 2 (December 15, 2023): 2246748. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2246748>.

Zakir, Muhammad Hamza, Sobia Bashir, Kiran Nisar, Shazia Ibrahim, Nida Khan, and Syed Hammad Khan. "Navigating the Legal Labyrinth: Establishing Copyright Frameworks for AI-Generated Content." *Remittances Review* 9, no. 1 (March 22, 2024): 2515–32.

Ziemianin, Karolina. "Civil Legal Personality of Artificial Intelligence: Future or Utopia?" *Internet Policy Review* 10, no. 2 (2021): 1–22. <https://doi.org/10.14763/2021.2.1544>.

Lampiran 1. Laman Website Jurnal Jambura Law Review (JALREV)

The screenshot shows the homepage of the Jambura Law Review website. The browser address bar displays ejournal.ung.ac.id/index.php/jalrev. The page features a navigation menu on the right with items such as AUTHOR GUIDELINES, TEMPLATE, PUBLICATION ETHICS, OPEN ACCESS POLICY, PEER REVIEW PROCESS, PLAGIARISM & RETRACTION POLICY, FOCUS & SCOPE, COPYRIGHT NOTICE, JOURNAL STATISTICS, AUTHOR FEE, and JOURNAL ARCHIVING. Below the menu, there is a USER section indicating the user is logged in as nandayuniza, with links for My Journals, My Profile, and Log Out. A CITATION ANALYSIS section includes logos for Scopus, iThenticate, and Mendeley. The main content area on the left contains the journal's title, a list of metadata (Abbreviation, Frequency, Language, DOI, Print ISSN, Online ISSN, Editor-in-Chief, Publisher, Country, Citation Analysis, OAI Address), a brief description of the journal's scope, and an Announcements section. The announcement states that the journal has been accepted by Scopus as of January 1st, 2024, and expresses gratitude to authors and readers. It also includes contact information for the editorial team and a posting date of 2024-01-04. At the bottom left, there is a link to <https://ejournal.ung.ac.id/index.php/jalrev/login/signOut> and a partially visible link for plates and Guidelines.

Jambura Law Review

Journal title : Jambura Law Review
Abbreviation : Jambura Law Rev.
Frequency : Biannual (January And July)
Language : English
DOI : 10.33756
Print ISSN : 2654-9255
Online ISSN : 2656-0461
Editor-in-Chief : Novendri Mohamad Ngglu
Publisher : Faculty of Law, Gorontalo State University
Country : Indonesia
Citation Analysis : Google Scholar
OAI Address : <http://ejournal.ung.ac.id/index.php/jalrev/oai>

Jambura Law Review is a peer-reviewed journal published by the Faculty of Law, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia. This journal aims to provide a global forum for legal scholars to disseminate their best works and bridge discourse on **The Contemporary Legal Issues in ASEAN and The Global Context**, which other academic journals have yet to cover. Jambura Law Review explores legal issues that individuals, entrepreneurs, and business owners face. Moreover, it discusses provocative and current issues either in the national or international community. This journal also intends to provide comprehensive, practical, reliable, and current information for practicing attorneys, judges, students, and academics regarding private law practice in Indonesia from a broader perspective.

Announcements

Jambura Law Review has been accepted by Scopus

We are sincerely grateful and proud to announce that Jambura Law Review (ISSN 2654-9255 | E-ISSN 2656-0461) as of January 1st 2024 has been accepted and indexed by Scopus.

We realize that all the contributions from the authors, reviewers, editors, and readers to this journal made this achievement possible. Therefore, we would like to extend our sincerest appreciation for your endless support.

To make the most of this opportunity, we would like to invite you to submit your article to our journal. We are looking forward to work and collaborate with you in the future.

Best Regards,
Jambura Law Review Editorial Team.

Posted: 2024-01-04

<https://ejournal.ung.ac.id/index.php/jalrev/login/signOut> plates and Guidelines

This is a duplicate of the screenshot above, showing the same content for the Jambura Law Review website homepage. The layout, text, and navigation elements are identical to the first image.

Lampiran 2. Laman Website Scopus

The screenshot displays the Scopus website interface for the source 'Jambura Law Review'. The browser address bar shows the URL 'scopus.com/sourceid/21101209166'. The page title is 'Source details'. The source information includes: 'Jambura Law Review', 'Years currently covered by Scopus: from 2020 to 2024', 'Publisher: State University of Gorontalo', 'ISSN: 2654-9255 E-ISSN: 2656-0461', 'Subject area: Social Sciences: Law', and 'Source type: Journal'. There are buttons for 'View all documents >', 'Set document alert', and 'Save to source list'. A CiteScore 2023 of 0.2 is displayed. Below this, there are tabs for 'CiteScore', 'CiteScore rank & trend', and 'Scopus content coverage'. The 'CiteScore 2023' section shows a score of 0.2 based on 5 citations and 32 documents from 2020-2023, calculated on 05 May, 2024. The 'CiteScoreTracker 2024' section shows a score of 0.4 based on 31 citations and 81 documents to date, last updated on 05 September, 2024. A 'CiteScore rank 2023' link is also present.

← → ↻ 🏠 🔄 scopus.com/sourceid/21101209166 ☆ 📱 📧 📄 🌐 Finish update ⋮

Scopus Preview Author Search Sources ? 🏛️ NE

Source details

Feedback > Compare sources >

Jambura Law Review

Years currently covered by Scopus: from 2020 to 2024
Publisher: State University of Gorontalo
ISSN: 2654-9255 E-ISSN: 2656-0461
Subject area: Social Sciences: Law
Source type: Journal

View all documents > Set document alert Save to source list

CiteScore 2023 0.2

CiteScore rank & trend Scopus content coverage

CiteScore 2023

0.2 = $\frac{5 \text{ Citations } 2020 - 2023}{32 \text{ Documents } 2020 - 2023}$
Calculated on 05 May, 2024

CiteScoreTracker 2024

0.4 = $\frac{31 \text{ Citations to date}}{81 \text{ Documents to date}}$
Last updated on 05 September, 2024 • Updated monthly

CiteScore rank 2023

Lampiran 3. Laman Website Sinta

The screenshot displays the SINTA profile for Jambura Law Review. The header includes the SINTA logo and navigation links. The main content area features a journal banner with the title 'JAMBURA LAW REVIEW' and affiliation 'UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO'. Key statistics are shown in three boxes: Impact (0), Google Citations (741), and Sinta Accreditation (Sinta 2). A bar chart titled 'Citation Per Year By Google Scholar' shows an upward trend from 2019 to 2022. Below the chart is a 'History Accreditation' timeline and a 'Garuda' article listing.

JAMBURA LAW REVIEW
 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 P-ISSN : 26560461 < > E-ISSN : 26549255

0 Impact
741 Google Citations
Sinta 2 Current Accreditation

Google Scholar Garuda Website Editor URL

History Accreditation

Year	Accreditation Status
2019	Accredited
2020	Accredited
2021	Accredited
2022	Accredited
2023	Accredited

Garuda Google Scholar

The Concept of Revitalizing Traditional Institutions in the Criminal Law System to Realize Restorative Justice
 Universitas Negeri Gorontalo | Jambura Law Review VOLUME 5 NO. 2 JULY 2023 220-234
 2023 | DOI: 10.33756/jlrv.v5i2.11682 | Accredited: Sinta 2

Citation Per Year By Google Scholar

Year	Citation Count
2019	~70
2020	~110
2021	~150
2022	~260
2023	~120
2024	0

Journal By Google Scholar

	All	Since 2019
Citation	741	741
h-index	17	17
i10-index	27	27